

Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival **(Collaborative Governance in Local Culture Values Development Program Through Banyuwangi Ethno Carnival)**

Bagus Nuari Harmawan, Inti Wasiati, Hermanto Rohman
Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: bagusnuari42@gmail.com; inti_w.fisip@unej.ac.id

Abstract

This study aims to describe collaborative governance in development program of local cultural values through Banyuwangi Ethno Carnival. The research used descriptive research type with qualitative approach and applied two types of data, namely primary data obtained from interview and observation and secondary data collected by documentation and literature study. Interviews were conducted with the parties involved in the problems to be analyzed. The data that had been collected were to be the information for the answer to the interview in this research. The data and information obtained showed that the stakeholders involved in BEC from 2011 to 2014 were Disbudparda (Department of Local Culture and Tourism) of Banyuwangi, JFC Management, Blambangan Arts Council and Carnival Instructors. In general, there were two patterns of cooperation in BEC event i.e. Public Private Partnership Pattern in 2011 and in 2012 until 2014. Barriers in building Collaborative Governance occurred in cultural and institutional factors.

Keywords: collaborative governance, stakeholders, Banyuwangi Ethno Carnival

Pendahuluan

Banyuwangi Ethno Carnival adalah salah satu *event* Kebudayaan Unggulan bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Indikasi tersebut tidak terlepas dari usaha pemerintah Banyuwangi untuk mendorong *event Banyuwangi Ethno Carnival* menjadi acara yang berskala internasional. Tahun 2014 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mendukung *Banyuwangi Ethno Carnival* masuk kalender pariwisata nasional. Melalui Menteri Pariwisata Arief Yahya, diagendakan acara *Banyuwangi Ethno Carnival* masuk dalam promosi wisata yang mencakup nasional dan mancanegara. Lebih lanjut, Arief Yahya menyatakan "setuju dan mendukung *Banyuwangi Ethno Carnival* masuk kalender pariwisata nasional, dan agenda wisata bagus seperti di Banyuwangi ini promosinya jangan hanya lokal, tapi juga harus internasional ke mancanegara" (Antarnews.com).

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil dalam melaksanakan *Banyuwangi Ethno Carnival* secara rutin setiap tahun dan mampu menunjukkan komitmen dalam mengkolaborasi budaya lokal dengan kemasan modern pada setiap penyelenggaraan. Pada awal pelaksanaannya di tahun 2011, *Banyuwangi Ethno Carnival* mengambil tari Gandrung, Damarwulan, dan Kunduran sebagai tema acara. (Banyuwangibagus.com) Pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* di tahun 2012 mengambil tema "Re-Barong" Using. Pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival* di tahun 2013 mengambil tema "The Legend Of Kebo-Keboan". Penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2014 mengambil tema "Tari Seblang".

Banyuwangi Ethno Carnival yang dilaksanakan secara rutin dengan kolaborasi budaya lokal dan desain

modernitas mampu memberikan dampak terhadap citra budaya Banyuwangi di lingkup nasional. Salah satu pencapaian positif yang diberikan dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* adalah penghargaan Kebudayaan 2015 yang diberikan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tanpa mengesampingkan kegiatan kebudayaan lain yang ada di Banyuwangi. Salah satu poin yang mendapatkan nilai lebih dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata terkait pelestarian budaya Banyuwangi adalah usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah Banyuwangi dalam menjalankan berbagai *event* kebudayaan secara konsisten dan budaya daerah ditampilkan secara berbeda dan istimewa (banyuwangikab.go.id)

Kesuksesan yang dicapai dalam setiap penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku penanggung jawab acara melibatkan aktor nonpemerintah dalam setiap penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

Konsep yang dibangun dalam *event Banyuwangi Ethno Carnival* adalah karnaval dengan desain kolaborasi budaya lokal dengan desain modernitas, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan peran sumber daya non-pemerintah agar mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival*, antara lain sebagai berikut.

1. Melibatkan Manajemen *Jember Fashion Carnival* yang telah sukses menyelenggarakan *Jember Fashion Carnival* sebagai *Event Organizer*;

2. Dewan Kesenian Blambangan;
3. Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi.

Pola kerjasama yang terbangun antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan *stakeholder* nonpemerintah bersifat kolaborasi. Secara definitif menurut Ansell dan Gash (2007:2) *Collaborative Governance* adalah “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or asset (Pengaturan yang mengatur pada satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan deliberatif serta hal itu bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen program-program atau aset publik).

Pada pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi memberikan peran kepada masing-masing *stakeholder* untuk melaksanakan fungsi kerja sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Pemerintah Banyuwangi melaksanakan kerjasama dengan *event organizer* Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai konsultan acara *Banyuwangi Ethno Carnival*. Hasil wawancara dengan Iwan, Staf Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai berikut.

“Keikutsertaan Manajemen *Jember Fashion Carnival* tidak terlepas dari keinginan pemerintah Banyuwangi untuk membantu menyelenggarakan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Tim Manajemen JFC adalah yang terbaik dalam menyelenggarakan *event* karnaval mulai dari pelaksanaan karnaval di Tenggarong sampai di Solo. Kerjasama yang terjalin antara kami dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersifat MOU. Dengan kontrak kerja tersebut kami terikat dalam tiga kali pelaksanaan karnaval. Kami diberikan tugas untuk menjadi konsultan BEC dan mendelegasikan penari kami untuk terlibat di acara dan menerjunkan instruktur untuk melatih peserta”. (Senin, 25 Januari 2016)

Untuk pagelaran tahun 2013 dan 2014 pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjuk Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi untuk menggantikan peran Manajemen JFC sebagai Instruktur *Banyuwangi Ethno Carnival*. Penunjukan tim instruktur karnaval tersebut tidak terlepas dari kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki *skill* dalam memberikan pelatihan kepada peserta *Banyuwangi Ethno Carnival*. Hasil wawancara dengan Ainur Rofiq, Kasi Informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut.

“Untuk menggantikan peran Manajemen *Jember Fashion Carnival* yang tidak melanjutkan kerjasama pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2013, kami menunjuk instruktur karnaval putra asli

Banyuwangi. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi instruktur Karnaval *Banyuwangi Ethno carnival* setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Manajemen JFC”. (Rabu, 13 Januari 2016)

Pada pelaksanaan *event Banyuwangi Ethno Carnival*, Dewan Kesenian Blambangan berperan untuk memberikan pertimbangan dalam setiap penentuan tema acara dan memberikan masukan terkait instrumen-instrumen budaya yang menjadi ciri khas. Motif keterlibatan Dewan Kesenian Blambangan yang menaungi budayawan tradisional Banyuwangi untuk terlibat dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* adalah untuk menjaga keaslian budaya Banyuwangi. Sikap dari Dewan Kesenian Blambangan tersebut ada karena konsep yang dibawakan dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* mengkolaborasi antara unsur tradisional dengan unsur modern. Landasan sikap menjaga tradisi yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Blambangan mengacu pada SK yang diterbitkan oleh Bupati Banyuwangi tahun 2010 tentang tugas Dewan Kesenian Blambangan untuk terlibat dalam pengembangan dan menjaga budaya asli Banyuwangi. Hasil wawancara dengan Bambang Lukito, Sekretaris Dewan Kesenian Blambangan sebagai berikut.

“Dewan Kesenian Blambangan merupakan sebuah wadah bagi budayawan banyuwangi sejak tahun 80-an untuk mengamati perkembangan sekaligus pelestarian budaya asli Banyuwangi. Dewan Kesenian Blambangan mendapatkan legitimasi dari pemerintah untuk mengamati budaya Banyuwangi mengacu pada SK Bupati. Pada pelaksanaan BEC. Sejak awal Dewan Kesenian Blambangan telah diajak berkomunikasi oleh Azwar Anas untuk membicarakan pelaksanaan karnaval budaya di Banyuwangi. Kami memberikan banyak sekali pertimbangan terkait kebutuhan yang diperlukan dalam penyelenggaraan acara tersebut. Pada beberapa tahapan lanjutan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kami diajak untuk berperan serta lebih jauh. Memang keterlibatan Dewan Kesenian Blambangan dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* tidak bersifat kontrak kerja, tetapi ketika kegiatan tersebut menyangkut aspek kebudayaan otomatis kami akan terlibat langsung di dalamnya. Segala aspek yang menyangkut budaya lokal Banyuwangi menjadi hak dari Dewan Kesenian Blambangan untuk terlibat langsung didalamnya”. (Kamis, 14 Januari 2016)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian tentang “**Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival**”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pola terbentuknya *Collaborative Governance* dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011-2014?
2. Bagaimana peran dan mekanisme kerja masing-masing *stakeholder* dalam tahapan penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011-2014?
- b. pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis;
- c. memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan bagi semua aktor.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pola terbentuknya *Collaborative Governance* dalam *Banyuwangi Ethno Carnival* dan peran serta mekanisme kerja masing-masing *stakeholder* dalam tahapan penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011-2014.

Tinjauan Pustaka

Nilai Budaya

Para pakar antropologi Indonesia umumnya sependapat bahwa kata "kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta *Buddhayah*. Kata *Buddhayah* adalah bentuk jamak dari budi atau akal (Maran,2007:24). Menurut Koentjaraningrat dalam Maran (2007:4) secara etimologis, kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal. kata kebudayaan bisa di seajajarkan dengan kata *culture*. Kata *culture* berasal dari bahasa latin *colere* yang berarti merawat, memelihara, menjaga, mengolah. Menurut Clifford Geert dalam Tuloli et al (2003:2) mendefinisikan Kebudayaan adalah sistem pemaknaan yang dimiliki bersamadan merupakan hasil dari proses sosial dan bukan dari proses individu.

Teori Governance

Sejak pertama kali muncul, paradigma penyelenggaraan pemerintahan mengalami beberapa fase perubahan. Menurut Chemma dalam Keban (2008: 37) terdapat empat fase perkembangan paradigma dalam administrasi publik yaitu fase *Traditional Public Administration*, *Public Management*, *New Public Management* dan paradigma *Governance*.

Collaborative Governance

Secara definitif menurut Ansell dan Gash (2007:2) *Collaborative Governance* adalah aransmen pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik melibatkan secara langsung *stakeholder* non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif serta bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program-program atau aset publik.

Model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2007:8) terdiri atas beberapa tahap berikut.

1. Starting Condition (Kondisi Awal)

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar *stakeholder*, masing-masing aktor memiliki latar belakang berbeda yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Ryan dalam Ansell dan Gash (2007:12) mengidentifikasi tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif, yaitu:

- a. manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi;

3. Desain Institusional (*Institutional Design*)

Ansell dan Gash (2007: 13) mendeskripsikan bahwa Desain institusional mengacu pada protokol dasar dan aturan-aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang paling ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi yang harus di tekankan adalah pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

4. Proses Kolaborasi (*Collaborative Process*)

Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. Gray dalam Ansell dan Gash (2007:15) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain *problem setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut.

- a. Dialog tatap muka (*Face to face*).
- b. Membangun kepercayaan (*Trust Building*).
- c. Komitmen terhadap proses (*Comitment to process*).
- d. *Share Understanding*.
- e. Hasil sementara.

Stakeholder

Definisi *Stakeholder* menurut Freeman dan Reed (1983:91) adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Mengacu pada asumsi Freeman, *stakeholder* dalam satu kondisi waktu dapat mempengaruhi dan pada kondisi tertentu dapat dipengaruhi oleh suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan.

Kordinasi Pelaksanaan Program

Kordinasi dapat dilaksanakan dengan baik apabila seluruh stakeholder, terutama penanggung jawab utama implementasi perlu memahami mekanisme kerja yang akan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan suatu program. Menurut Hall dan O'toole jr dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2012:154) terdapat tiga kategori mekanisme kerja atau hubungan antar Stakeholder yang terlibat dalam implementasi suatu kebijakan atau pelaksanaan program, sebagai berikut.

- a. Proses Implementasi dengan menggunakan Mekanisme Kerja Menggugub (*Pooled*).
- b. Proses Implementasi dengan menggunakan Mekanisme Kerja Berurutan (*Sequential*).
- c. Proses Implementasi dengan menggunakan Mekanisme Kerja Timbal-Balik (*Reciprocal*).

Public Private Partnership

Menurut Nijkamp dalam Subarsono et al (2016: 173) *public private partnership* adalah suatu bentuk hubungan kelembagaan antara pemerintah dan swasta, yang didasari oleh objek, komitmen kerjasama dan tiap pihak bersedia menerima resiko sesuai dengan pendapatan dan biaya. Sedangkan menurut Van Ham dan Koppens dalam Subarsono et al (2016: 179),

Public Privat Partnership merupakan kerjasama antara aktor-aktor publik-swasta di mana mereka bersama-sama mengembangkan produk dan jasa serta pembagian resiko, biaya dan sumber daya yang dihubungkan dengan produk dan pelayanan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Ndraha (1987:39) penelitian deskriptif bermaksud untuk meneliti dan menemukan informasi seluas-luasnya tentang variabel yang bersangkutan, sedangkan metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeliong (2004:3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada *setting* sosial tertentu tidak dimaksudkan untuk mewakili atau sebagai representasi dari latar tertentu. Hal ini disebabkan oleh sifat penelitian kualitatif yang sangat kontekstual dan berupaya untuk menelaah fenomena sosial pada level mikro, dan tidak bermaksud melakukan generalisasi (Bungin, 2012: 45). Penelitian akan dilaksanakan kepada beberapa *stakeholder* pelaksanaan *event* Banyuwangi Ethno Carnival, dengan pertimbangan sebagai berikut.

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten merupakan instansi yang memiliki otoritas sebagai penanggung jawab Program.
2. Manajemen *Jember Fashion Carnival* sebagai Konsultan *Banyuwangi Ethno Carnival* Tahun 2011 dan 2012.
3. Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi sebagai instruktur *Banyuwangi Ethno Carnival* 2013 dan 2014.
4. Dewan Kesenian Blambangan yang memiliki peran dalam memberikan pertimbangan kebudayaan dalam pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari mekanisme wawancara yang dilaksanakan kepada informan dan observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi yang sudah mengolah data yang diperlukan dalam penelitian. Penentuan informan dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*.

Berdasarkan beberapa indikator yang tercantum dalam RENSTRA (Rencana Strategis) serta otoritas yang dimiliki oleh pejabat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, beberapa pihak yang menjadi informan sebagai berikut.

1. Kasi Informasi Budaya dan Pariwisata Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi.
2. Anggota Manajemen *Jember Fashion Carnival*.
3. Ketua Komunitas Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi.
4. Pengurus Dewan Kesenian Blambangan.

Pada penelitian tersebut wawancara dilaksanakan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Banyuwangi, Manajemen *Jember Fashion Carnival*, Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi dan Dewan Kesenian Blambangan. Pada penelitian ini, akan dicari data dokumen terkait dengan profil kegiatan, pelaksanaan program, dan peran masing-masing aktor pelaksana pada *Event Banyuwangi Ethno Carnival*.

Peneliti memilih teknik triangulasi sebagai teknik menguji keabsahan data. Teknik triangulasi terdiri atas triangulasi metode, teori, penelitian lain, dan informan.

Hasil dan Pembahasan

Pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2011 terdapat tiga *stakeholder* yang berkerjasama dalam penyelenggaraan karnaval yaitu DisbudparDa Banyuwangi, Manajemen JFC dan Dewan Kesenian Blambangan. Pada penyelenggaraan BEC 2011 pola yang terbangun dalam kerjasama antar *stakeholder* berbentuk *public privat partnership*. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pola membangun kerjasama dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

Tahapan kerjasama diawali tatap muka yang mempertemukan antar *stakeholder* dalam merencanakan pelaksanaan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Dialog tatap muka yang terjalin antara Bupati dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan non-pemerintah seperti Dewan Kesenian Blambangan dan Manajemen *Jember Fashion Carnival* merupakan sarana untuk membicarakan terkait pandangan masing-masing pihak untuk pelaksanaan sebuah *event* karnaval di Kabupaten Banyuwangi. Muncul resistensi dari masing-masing *stakeholder* terkait persepektif penggabungan unsur budaya tradisional dengan kemasan modern. *Stakeholder* yang memiliki perbedaan pandangan adalah Manajemen JFC dengan Dewan Kesenian Blambangan.

Menurut Awaludin (2007: 113) terdapat lima bentuk *public private partnership* sebagai berikut.

- a. Kontrak pelayanan (*Service Contract*).
- b. Kontrak kelola (*Management Contract*).
- c. Kontrak sewa (*Lease Contract*).
- d. Kontrak bangun (*Rehabilitasi*).
- e. Kontrak konsesi (*Concession Contract-CC*).

Pada konteks kerjasama antar *stakeholder* dalam pelaksanaan BEC, masing-masing aktor menerapkan bentuk *public privat partnership* bersifat kontrak pelayanan. Secara definitif kontrak pelayanan adalah bentuk kerjasama ini, mitra swasta diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam suatu jangka tertentu. Dewan Kesenian Blambangan dan Manajemen JFC menawarkan bentuk kontrak pelayanan dalam memberikan kinerjanya pada proses penyelenggaraan BEC.

Pada penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* 2012 sampai 2014 pola kerjasama antar *stakeholder* berbentuk *collaborative governance*. Tahapan yang dilalui dalam setiap penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* meliputi tahapan sebagai berikut.

a. Dialog tatap muka

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi selaku penanggung jawab karnaval menginisiasi sebuah pertemuan dengan *stakeholder* yang terdiri atas Manajemen JFC dan Dewan Kesenian

Blambangan. Pertemuan tersebut dilaksanakan untuk membahas segala instrumen yang diperlukan dalam menyelenggarakan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Pertemuan tersebut bisa disebut sebagai awalan untuk menjalin kerjasama secara penuh dalam satu periode persiapan penyelenggaraan BEC. Pertemuan tersebut juga berbentuk non-formal sesuai dengan kebutuhan persiapan BEC.

b. Membangun *trust*

Terbentuknya kepercayaan antar pihak tidak terlepas dari terjalinnya komunikasi yang intens antara berbagai pihak yang terlibat dalam *Banyuwangi Ethno Carnival*. Proses pertama terbentuknya *trust* tidak terlepas dari keterlibatan Manajemen JFC dan Dewan Kesenian Blambangan dalam kerjasama penyelenggaraan BEC 2011. Komunikasi informal yang terjalin secara intens antara Manajemen JFC dengan Dewan Kesenian Blambangan dalam diskursus dalam mempersiapkan BEC berdampak pada keterbukaan masing-masing *stakeholder* dalam memberikan perspektifnya dan memunculkan turunnya ego masing-masing pihak dalam memberikan masukan konsep penggabungan budaya tradisional dengan kemasan modern dalam BEC.

c. Komitmen terhadap Proses (*Comitmen to Procces*)

Komitmen masing-masing *stakeholder* dalam penyelenggaraan BEC mengacu pada teks MOU dan SK Bupati tentang DKB. Legitimasi yang dimiliki oleh Dewan Kesenian Blambangan untuk berperan serta menangani sektor budaya berlandaskan atas dukungan dari Bupati Banyuwangi melalui Surat Keputusan Bupati yang masing-masing diterbitkan pada periode 2010 dan 2014.

d. Sikap saling memahami (*Share Understanding*)

Pada pelaksanaan *collaborative governance* antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dengan Dewan Kesenian Blambangan dan Manajemen *Jember Fashion Carnival* adalah menjalankan langkah strategis untuk menentukan fase-fase persiapan penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator mengundang Manajemen *Jember Fashion Carnival* dan Dewan Kesenian Blambangan untuk memberikan perspektif terkait peran masing-masing pihak dalam mensukseskan acara karnaval tersebut. Konsensus yang tercapai tersebut menyangkut tahapan-tahapan persiapan karnaval, sebagai berikut.

- a. Penentuan tema *Banyuwangi Ethno Carnival*.
- b. Prototipe kostum peserta.
- c. Sosialisasi peserta.
- d. Musik pengiring *Banyuwangi Ethno Carnival*.
- e. Audisi peserta.
- f. Workshop *Banyuwangi Ethno Carnival*.
- g. Presentasi kostum.
- h. *Show time Banyuwangi Ethno Carnival*.

Penutup

Kesimpulan

Proses kerjasama antar-*stakeholder* di tahun 2011 masih berbentuk *public private partnership* karena

belum terbentuk pola kerjasama yang stabil dan terstruktur. Pada tahun 2012 baru terbentuk sebuah *collaborative governance* yang stabil dengan tahapan kerjasama yang terstruktur. Tahapan kerjasama diawali dialog awal persiapan yang melibatkan tiga *stakeholder* dan didukung komunikasi informal dalam frame pembahasan masalah yang sama. Kemudian terbentuk juga *trust* antar masing-masing pihak dalam bekerjasama. Terbangun lanjutan komitmen yang terlegitimasi oleh Mou dan SK Bupati terkait DKB. Proses *collaborative* terakhir adalah membangun sikap saling memahami yang menghasilkan *output* persiapan penyelenggaraan BEC. *Output* yang terbentuk dari proses membangun *collaborative* tersebut adalah tahapan operasional penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan perspektif peneliti selama di lapangan, peneliti mengemukakan beberapa saran. Saran ini ditujukan untuk proses *collaborative governance* dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* di periode 2011 sampai 2014. Saran tersebut akan di indikatkan dalam beberapa poin, sebagai berikut.

1. Mendorong pembentukan badan hukum bagi komunitas Instruktur Karnaval Putra Asli Banyuwangi agar bisa langsung bekerjasama dalam *collaborative governance Banyuwangi Ethno Carnival* tanpa harus mengatasmakan CV Dinar sehingga tidak memerlukan pihak perantara dalam menjalin kerjasama antar pihak.
2. Perlunya penerbitan peraturan berbentuk SK oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk kerjasama antar pihak sehingga landasan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival* mempunyai kekuatan hukum.
3. Pemberian wadah aspiratif dengan membentuk forum komunikasi untuk mendengarkan aspiratif sekolah, universitas atau komunitas yang mendelegasikan personilnya sebagai peserta *Banyuwangi Ethno Carnival* untuk memberikan perspektifnya terkait keperluan bagi para peserta yang perlu ditingkatkan.
4. Pembentukan wadah yang menampung peserta pe menang *Banyuwangi Ethno Carnival*, sehingga terdapat *reward* berupa ruang aktualisasi yang simultan dan berdampak pada meningkatkannya potensi masing-masing personil.

Daftar Pustaka

Buku

- Awaludin. 2007. *Mengelola Dinamika Politik dan Jejaring Pemerintahan*. Yogyakarta: Jogja Global Media.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Freeman, Howard. 1998. *Evaluation Systemic Approach*. Jakarta: Sage.

- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Keban, Yermias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maran, Raga Rafael. 2007. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT Rineka.
- Moelng, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1996. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- [Ndraha, Taliziduhu](#). 1987. *Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, D. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Rosidi, Abidarini dan Anggraeni, R. Fajriani. 2013. *Reinventing Government: Demokrasi dan Reformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Subarsono, Agustinus. 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Surjono. 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sutarto, Ayu dkk. 2004. *Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provinsi Jawa Timur*. Jember: Kompyawisda Jatim.
- Tuloli, Nani dkk. 2003. *Dialog Budaya Wahana Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Bangsa*. Jakarta: CV Mitra Sari.
- Skripsi dan Jurnal**
- Freeman, H & Reed, D. 1983. Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *Jurnal California Management Review*, 25 (3): 88-106.
- Ansell, C & Gash, A. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.
- Hutami, Gartiria. 2011. Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Mustafa, Hasan. 2011. Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis (2011)*, Vol.7, No.2: hal. 143-156.
- Produk Hukum**
- Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Jember Fashion Carnival. Nomor: 188/5863/429.012/2011 tentang Penyelenggaraan *Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)*.
- Pakta Integritas Pengadaan Pekerjaan Jasa Konsultasi Untuk Paket Pekerjaan Audisi dan *workshop* peserta BEC 2013.
- RENJA (Rencana Kerja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 2011-2014.
- RENSTRA (Rencana Strategis) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.
- Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Pembentukan Dewan Kesenian Blambangan Tahun 2010-2013.
- Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Tentang Pembentukan Dewan Kesenian Blambangan
- Website**
- Anwar, Ruli. 2013. Banyuwangi Ethno Carnival Angkat Kebudayaan Lokal. Liputan 6.com. <http://citizen6.liputan6.com/read/687507/banyuwangi-ethno-carnival-angkat-kebudayaan-lokal>. (5 November 2015).
- Banyuwangikab.go.id. (Diakses 5 November).
- Banyuwangibagus.com. (Diakses 3 November).
- Banyuwangitourism.com. (Diakses 7 November).
- Hamdani, Irul. 2012. "Banyuwangi Ethno Carnival di Protes BudayawanLokal.Detik.com.http://hot.detik.com/read/2012/10/29/081624/2074627/475/banyuwangi-ethno-carnival-diprotes-seniman-lokal. (7 November 2015)".
- Kusbiantoro, Didik. 2014. Kemenpar Dukung "Banyuwangi Festival Masuk Agenda Nasional. Antara News.Com.http://www.antarajatim.com/lihat/berita/146029/kemenpar-dukung-banyuwangi-festival-masuk-kalender-wisata-nasional.(5 November 2015).
- Ningtyas, Ika. 2011. Ribuan Warga Padati Banyuwangi Ethno Carnival. Tempo.com.http://seleb.tempo.co/read/news/2011/10/22/161362775/ribuan-warga-padati-banyuwangi-ethno-carnival. (3 November 2015).
- Rachmawati, Ira. 2014. Tiga Warisan Budaya Berasal Dari Banyuwangi Kompas.com.http://travel.kompas.com/read/2014/10/31/154852427/Tiga.Warisan.Budaya.Nasional.Berasal.dari.Banyuwangi. (10 November 2015).
- Setya, Budi Candra. 2015. Ramai Seni Budaya Banyuwangi di Banyuwangi Ethno Carnival. Tempo.com.<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/10/20/058711402/ramai-seni-budaya-banyuwangi-di-banyuwangi-ethno-carnival>. (7 November 2015).